



ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MEMPREDIKSI KEMUNGKINAN FINANCIAL DISTRESS

Khoirul Fariz Atmaja ✉

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima September 2012
Disetujui Oktober 2012
Dipublikasikan November 2012

Keywords:
financial distress
Local government
ratio of financial

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui rasio kinerja keuangan, rasio posisi keuangan, rasio efisiensi, dan rasio hutang apakah adapengaruh secara simultan ataupun parsial dalam memprediksi kondisi *financial distress* pada pemerintah daerah di Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 31 pemerintah daerah kota/kabupaten di Jawa Tengah yang bersumber dari Laporan Neraca dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2010. Metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Alat yang digunakan penelitian ini adalah regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel rasio kinerja keuangan, variabel posisi keuangan, variabel rasio efisiensi, dan variabel rasio hutang secara simultan mempengaruhi kemungkinan financial distress. Secara parsial rasio posisi keuangan berpengaruh terhadap kemungkinan financial distress, rasio efisiensi berpengaruh terhadap kemungkinan financial distress, dan rasio hutang berpengaruh terhadap kemungkinan *financial distress*, tetapi rasio kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap kemungkinan *financial distress*.

Abstract

Purpose of this research is to know the ratio of financial performance, the ratio of financial position, the ratio of efficiency, and the ratio of debt can affect simultan or partial in forecasting the condition of financial distress in the local government in Central Java. This research using a sample of as much as 31 city/district local government in Central Java were sourced from the balance sheet Budget Report and the realization of the income and Expenditure Budget (BUDGETS) in 2010. A method of the sample uses the method purposive of sampling. This research tool used logistic regression. The results showed that the variable of financial performance ratio, variable of financial position ratio, variable of efficiency ratio, and variables of debt ratio affect the possibility of simultan financial distress. In a partial the ratio of the financial position of affect the possibility of financial distress, the ratio of efficiency affect the possibility of financial distress, and ratio of debt affect the possibility of financial distress. But the ratio of financial performance not affect the possibility of financial distress.

© 2012 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:
Gedung C6 Lantai 1 FE Unnes Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: fariz.atmaja@gmail.com

Pendahuluan

Dewasa ini kinerja keuangan daerah banyak dibicarakan oleh masyarakat terkait kondisi keuangan pemerintah daerah. Mengutip temuan Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), di Indonesia terdapat 124 PEMDA yang 60% lebih APBD-nya untuk belanja pegawai. Jika kondisi keuangan ini dibiarkan berlalu-lalu, kebangkrutan PEMDA diperkirakan mengancam daerah dalam 2–3 tahun mendatang. Idealnya, belanja pegawai kurang dari 50% dari total APBD. Jika melebihi, atau setiap tahun belanja pegawai mengalami kenaikan hingga menghilangkan rasionalitas struktur APBD, yang dirugikan adalah rakyat. Dipastikan banyak sektor publik dan pelayanan yang tidak akan memperoleh anggaran secara cukup, Republika (04/07/2011). Selain itu dikabarkan dari *SOLOPOS* edisi Rabu (27/7/2011) Mayoritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di negeri ini habis untuk belanja pegawai. Dalam APBD Kabupaten Klaten 2011, belanja pegawai menghabiskan 70% dari total APBD-nya, di Solo 60%, di Boyolali 69%, di Sukoharjo 62,98%, di Sragen 64,4% dan di Karanganyar 75%.

Sejak 2007, pemerintah pusat selalu menaikkan gaji pegawai sekitar 5%–15 %, dan daerah merekrut CPNS secara tidak terkontrol, dan pada saat yang sama pemerintah tidak mengalokasikan kebutuhan anggaran yang meningkat tersebut dalam Dana Alokasi Umum (DAU). Pada 2009, karena sebagai “tahun politik”, pemerintah pusat menaikkan gaji PNS 15%, ditambah pengangkatan CPNS dari kalangan para pegawai tidak tetap, dan para sekretaris desa diangkat jadi PNS. Saat itu, PEMDA Boyolali membutuhkan anggaran sekitar Rp 80 miliar, akan tetapi DAU hanya ditambah Rp 14 miliar. Pada 2010, pemerintah pusat menaikkan gaji PNS sebesar 5%, itu membutuhkan anggaran sekitar Rp 24 miliar, namun DAU 2010 hanya ditambah Rp 1,4 milyar.

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa banyak pemerintah daerah yang terindikasi akan mengalami kebangkrutan. Kebangkrutan merupakan masalah yang sangat serius karena jika benar-benar mengalami kebangkrutan, maka pemerintah daerah tersebut akan mengalami keterpurukan. Sebelum mengalami kebangkrutan, maka pemerintah daerah akan mengalami suatu kondisi kesulitan keuangan yang disebut dengan *Financial distress*. Dengan mengetahui kondisi *Financial distress* sejak dini diharapkan pemerintah daerah dapat melakukan tindakan-tindakan untuk mengantisipasi kondisi yang mengarah pada

kebangkrutan.

Financial distress dalam definisi sektor publik (Jones dan Walker, 2007) yaitu ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan pelayanan pada publik sesuai standar mutu pelayanan yang telah ditetapkan. Ketidakmampuan pemerintah ini karena pemerintah tidak mempunyai ketersediaan dana untuk diinvestasikan pada infrastruktur yang digunakan dalam penyediaan pelayanan pada publik tersebut

Kondisi kesehatan keuangan pemerintah daerah dapat dinilai dengan cara menganalisis rasio keuangan yang terdapat dalam informasi laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan pemerintah merupakan perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Penelitian ini menguji rasio keuangan pada informasi laporan keuangan pemerintah daerah, yang terindikasi mengalami *financial distress* (kesulitan keuangan). Terkait kesulitan keuangan pemerintah daerah, Peraturan Pemerintah No. 54/2005 tentang Pinjaman Daerah menetapkan persyaratan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pinjaman daerah guna mengatasi kesulitan keuangan tersebut yaitu nilai *debt service coverage ratio* minimal 2,5. Macam-macam variabel rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran rasio kinerja keuangan, ukuran rasio posisi keuangan, ukuran rasio efisiensi, ukuran rasio hutang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah rasio kinerja keuangan berpengaruh terhadap prediksi kondisi *financial distress*?, apakah rasio posisi keuangan berpengaruh terhadap prediksi kondisi *financial distress*?, apakah rasio efisiensi berpengaruh terhadap prediksi kondisi *financial distress*?, apakah rasio hutang berpengaruh terhadap prediksi kondisi *financial distress*?

Hasil penelitian ini merupakan kontribusi pada pemerintah daerah, untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait yang memerlukan hasil penelitian ini melalui indikator-indikator rasio keuangan dari informasi laporan keuangan dalam pengambilan keputusan mengenai pinjaman daerah.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini populasinya adalah Kabupaten/Kotase Provinsi Jawa Tengah. Populasi dalam penelitian ini sejumlah 35 Kabupaten/Kota yang ada dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sampel bertujuan atau *Purposive Sample*. Dimana sampel

yang diambil memiliki kriteria tertentu seperti Kabupaten/Kota menyampaikan laporan realisasi APBD dan laporan neraca tahunan kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2010. Sehingga dalam penelitian ini mendapatkan sampel sebanyak 31 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen dan variabel independen. Variabel – variabel tersebut dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut:

Variabel Dependen

Variabel Y dalam penelitian ini yaitu *financial distress*, pengukuran *financial distress* diprosikan dengan pinjaman daerah. Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah. Dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa salah satu syarat untuk dapat melakukan pinjaman daerah adalah nilai *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) paling sedikit 2,5 (dua setengah). Dalam penelitian Sutaryo (2010) membedakan variabel Y (*financial distress*) dalam dua kelompok yaitu, untuk pemerintah daerah yang perhitungan DSCR < 2,5 tidak diperbolehkan melakukan pinjaman, maka dinyatakan mengalami *financial distress* sehingga dilambangkan dengan angka 0, dan untuk pemerintah daerah yang perhitungan DSCR > 2,5 dinyatakan dalam kondisi *non financial distress* dan dilambangkan dengan angka 1 (Sutaryo, 2010)

$$DSCR = \frac{(PAD+BD+DAU)-BW}{Total (Pokok Angsuran+Bunga+Biaya Pinjaman)}$$

Variabel Independen

Rasio kinerja keuangan

Rasio ini merupakan perbandingan jumlah pendapatan dikurangi jumlah pengeluaran, dibanding dengan jumlah pendapatan.

Performance Government Wealth (PerGW)

$$PerGW = \frac{(Total revenue - Total expenditure)}{Total revenue}$$

Rasio posisi keuangan

Rasio ini merupakan perbandingan antara jumlah total aset dengan jumlah pendapatan.

Position Government Wealth (PosGW)

$$PosGW = \frac{Total net asset}{Total revenue}$$

Rasio efisiensi

Rasio ini merupakan perbandingan antara jumlah pengeluaran modal terhadap pendapatan daerah.

Level of Capital Outlay (LCO)

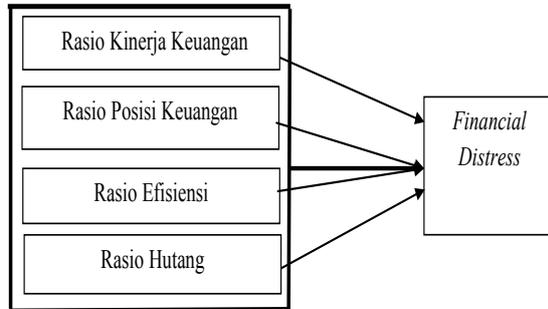
$$LCO = \frac{Jumlah pengeluaran modal}{Jumlah pendapatan asli daerah (PAD)}$$

Rasio hutang

Rasio ini merupakan perbandingan antara jumlah total hutang dengan jumlah total pendapatan.

Debt to revenue (DTR)

$$DTR = \frac{Total debt}{Total revenues}$$



Gambar 1 Kerangka Pemikiran Teoritis

Hipotesis

H₁: Secara simultan adapengaruh ukuran rasio kinerja keuangan, ukuran rasio posisi keuangan, ukuran rasio efisiensi, dan ukuran rasio hutang terhadap pemerintah daerah yang mengalami *financial distress*.

H₂: Ada pengaruh negatif rasio kinerja keuangan terhadap pemerintah daerah yang mengalami *financial distress*.

H₃: Ada pengaruh negatif rasio posisi keuangan terhadap pemerintah daerah yang mengalami *financial distress*.

H₄: Ada pengaruh rasio efisiensi terhadap pemerintah daerah yang mengalami *financial distress*.

H₅: Ada pengaruh rasio hutang terhadap pemerintah daerah yang mengalami *financial distress*

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil analisis statistik deskriptif per variabel pada Tabel 1.1 untuk variabel kinerja keuangan dengan indikator *Performance Government Wealth* (PerGW) memiliki angka minimum sebesar -0.0784, sedangkan angka maximum diperoleh dengan angka 0,1164, dan untuk rata-rata diperoleh angka sebesar 0,10205. Variabel posisi keuangan dengan indikator *Position Government Wealth* (PosGW) memiliki angka minimum sebesar 1,0839, sedangkan angka maximum diperoleh dengan angka 11,7611, dan untuk rata-rata diperoleh angka sebesar 2,793689. Variabel efisiensi dengan indikator *Level of Capital Outlay* (LCO) memiliki angka minimum sebesar 0,00, sedangkan angka maximum diperoleh dengan angka 0,1598, dan untuk rata-rata diperoleh angka se-

Tabel 1.1 Deskriptif per Variabel

| Descriptive Statistics | | | | | |
|------------------------|----|---------|---------|-----------|----------------|
| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| PerGW | 31 | -,0784 | ,1164 | ,010205 | ,0393437 |
| PosGW | 31 | 1,0839 | 11,7611 | 2,793689 | 2,0990989 |
| LCO | 31 | ,0000 | ,1598 | ,051939 | ,0424700 |
| DTR | 31 | ,000000 | ,073695 | ,00815599 | ,015089718 |
| Valid N (listwise) | 31 | | | | |

Sumber: Data primer yang diolah, 2012

Tabel 1.2 hasil Menilai Model Fit

| | |
|--|--------|
| Perbandingan nilai -2LL Awal dengan nilai -2LL Akhir | |
| -2LL awal (Block number = 0) | 33,220 |
| -2LL akhir (Block number = 1) | 17,436 |

Sumber : Data Sekunder diolah tahun 2012

Tabel 1.3 hasil menilai kelayakan model regresi Hosmer and Lemeshow Test

| Step | Chi-square | Df | Sig. |
|------|------------|----|------|
| 1 | 7,940 | 8 | ,439 |

Sumber : Data sekunder diolah tahun 2012

besar 0,051939. Variabel hutang dengan indikator *Debt to Revenue (DTR)* memiliki angka minimum sebesar 0,00, sedangkan angka maximum diperoleh dengan angka 0,073695, dan untuk rata-rata diperoleh angka sebesar 0,00815599.

Hasil analisis statistik inferensial

Menilai Model Fit

Tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa adanya penurunan nilai -2LL awal (Block number = 0) sebesar 33,220 menjadi -2LL akhir (Block number = 1) sebesar 17,436. Terjadi penurunan sebesar 15,784 pada (-2LikeLihood) -2LL menunjukkan bahwa model fit dengan data sehingga H_0 diterima karena terjadi penurunan model regresi yang lebih baik.

Menilai kelayakan model regresi

Tabel 1.3 menunjukkan nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,439. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima yang berarti tidak ada perbedaan antara model dengan data. Hal ini berarti model regresi layak untuk digunakan dalam analisis selanjutnya karena model cocok dengan data.

Pengujian Simultan

Hasil *Omnibus Test of Model Coefficients* dapat dilihat pada Tabel 3.4 diatas. Tabel 1.4 menunjukkan bahwa nilai *Chi-square* sebesar 15,682 dengan *degree of freedom* = 4 dan tingkat signifikansi sebesar 0,003. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari

0,05 maka H_a diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan signifikansi 5% variabel rasio kinerja keuangan, rasio posisi keuangan, rasio efisiensi keuangan, dan rasio hutang keuangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap *financial distress*.

Koefisien Determinasi

Nilai Nagelkerke R square dari hasil pengolahan data dengan SPSS versi 19.0 menunjukkan hasil sebesar 0,605 yang berarti bahwa variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar 60,5%, sedangkan sisanya sebesar 39,5% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian ini.

Matrik Klasifikasi

Tabel 1.6 menunjukkan bahwa tingkat prediksi 95,8% *Non Financial Distress* dan 57,1% *Financial Distress* telah mampu diprediksi oleh model. Secara keseluruhan model dengan variabel rasio kinerja keuangan, rasio posisi keuangan, rasio efisiensi, dan rasio hutang pemerintah daerah Kabupaten/Kota secara statistik dapat diprediksi sebesar 87,1%. Kesimpulan dari Tabel 3.6 bahwa kemampuan prediksi dari model regresi kemungkinan pemerintah daerah Kabupaten/Kota tidak mengalami *Financial Distress* adalah sebesar 95,8%. Sebanyak 23 pemerintah daerah Kabupaten/Kota (95,8%) dari 24 pemerintah daerah Kabupaten/Kota sampel yang diprediksi tidak mengalami *Financial Distress*. Berikutnya terdapat 4 pemerintah daerah Kabupaten/Kota (57,1%) yang diprediksi mengalami *Financial Distress* dari jumlah sampel sebanyak 7 pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang mengalami *Financial Distress*.

Estimasi Parameter dan Interpretasinya

Tabel 1.7 menunjukkan hasil pengujian dengan regresi logistik pada tingkat signifikansi 0,05 (5%). Dari pengujian tersebut maka diperoleh model regresi logistik sebagai berikut :

$$\ln \frac{FD}{1-FD} = 6,629 - 8,373PerGW - 1,150PosGW - 50,117LCO + 228,758 DTR + e$$

Tabel 1.4 hasil Pengujian Simultan

| Omnibus Tests of Model Coefficients | | Chi-square | Df | Sig. |
|-------------------------------------|-------|------------|----|------|
| Step 1 | Step | 15,682 | 4 | ,003 |
| | Block | 15,682 | 4 | ,003 |
| | Model | 15,682 | 4 | ,003 |

Sumber : Data sekunder diolah tahun 2012

secara positif berhubungan dengan DTR.

Pembahasan

Pengaruh Rasio Kinerja Keuangan Terhadap Kemungkinan Kondisi Financial Distress

Tabel 1.5 hasil Koefisien Determinasi

| Model Summary | | | |
|---------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Step | -2 Log likelihood | Cox & Snell R Square | Nagelkerke R Square |
| 1 | 17,436 ^a | ,397 | ,605 |

Sumber : Data sekunder diolah tahun 2012

Tabel 1.6 hasil Matrik Klasifikasi (Classification Table)

| | Observed | Predicted | | |
|--------------------|----------|-----------|----|--------------------|
| | | DSCR | | Percentage Correct |
| | | 0 | 1 | |
| Step 1 | DSCR 0 | 4 | 3 | 57,1 |
| | 1 | 1 | 23 | 95,8 |
| Overall Percentage | | | | 87,1 |

Sumber : Data sekunder diolah tahun 2012

Tabel 1.7 Variables in the Equation

| | B | S.E. | Wald | Df | Sig. | Exp(B) | |
|---------------------|----------|---------|--------|-------|------|--------|----------|
| Step 1 ^a | PerGW | -8,373 | 16,629 | ,254 | 1 | ,615 | ,000 |
| | PosGW | -1,150 | ,564 | 4,156 | 1 | ,041 | ,317 |
| | LCO | -50,117 | 21,360 | 5,505 | 1 | ,019 | ,000 |
| | DTR | 228,758 | 94,937 | 5,806 | 1 | ,016 | 2,230E99 |
| | Constant | 6,629 | 2,618 | 6,411 | 1 | ,011 | 756,695 |

Sumber : Data sekunder diolah tahun 2012

Hasil penelitian menunjukkan variabel bebas kinerja keuangan dengan indikator PerGW yang diukur dengan penerimaan dikurangi pengeluaran dibagi dengan penerimaan tidak signifikan pada prob 0,615, variabel posisi keuangan dengan indikator PosGW yang diukur dengan total asset dibagi dengan pendapatan signifikan pada prob 0,041, variabel efisiensi dengan indikator LCO yang diukur dengan penyertaan modal dibagi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) signifikan pada prob 0,019. Dan variabel utang dengan indikator DTR yang diukur dengan kewajiban dibagi pendapatan signifikan pada prob 0,16. Dari persamaan regresi logistik di atas dapat dilihat bahwa log of odds *financial distress* akan sukses secara negatif berhubungan dengan kondisi PerGW, PosGW, dan LCO, dan akan sukses

Rasio *Performance Government Wealth* (PerGW) memiliki koefisien sebesar -8,373 dengan nilai signifikansi 0,615 yang berarti H_0 ditolak. Variabel rasio kinerja keuangan pemerintah daerah yang dihitung oleh rasio *Performance Government Wealth* (PerGW) menunjukkan nilai koefisien sebesar -8,373 yang berarti satu persen kenaikan *Performance Government Wealth* (PerGW) akan menurunkan kondisi *financial distress* dengan $\exp = 0,00$.

Surplus/defisit dalam APBD merupakan hasil kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD, sebagai suatu bentuk kontrak antara eksekutif dan legislatif. Meskipun pengajuan rancangan APBD merupakan hak prerogatif Kepala Daerah, namun setelah menjadi Perda APBD, birokrasi (kepala SKPD selaku pengguna ang-

garan/PA dan pegawai di bawahnya) berkewajiban melaksanakan APBD apa adanya. Kepala SKPD/PA tidak mempunyai ruang untuk membuat kebijakan (*no discretionary power*).

Pengaruh Rasio Posisi Keuangan Terhadap Kemungkinan Kondisi Financial Distress

Pengujian variabel posisi keuangan dengan indikator rasio *Position Government Wealth* (PosGW) memiliki koefisien sebesar -1,150 dengan nilai signifikansi 0,041 yang berarti H_a diterima. Variabel posisi keuangan yang dihitung dengan *Position Government Wealth*(PosGW) pemerintah daerah Kabupaten/Kota menunjukkan nilai koefisien sebesar -1,150 yang berarti satu persen kenaikan *Position Government Wealth* (PosGW) akan menurunkan kondisi *financial distress* dengan $\exp = 0,317$.

Salah satu sektor yang dapat diharapkan menjadi pendapatan daerah adalah melalui sektor properti. Potensi sektor properti di daerah tidak hanya dalam pembangunan properti saja, namun juga menyangkut pengelolaan properti yang sudah dimanfaatkan ataupun yang belum dimanfaatkan secara optimal. Namun dalam perkembangannya, pemerintah daerah tidak hanya mengoptimalkan pada potensi pajak dari sektor properti saja, tetapi juga harus mengetahui jumlah dan sejauh mana pemanfaatan aset properti yang dimiliki pemerintah daerah saat ini. Manajemen aset properti ini sangat penting diketahui karena di samping sebagai penentuan aktiva tetap dalam faktor penambah dalam total aset daerah juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pendapatan yang menopang pendapatan asli daerah.

Pengaruh Rasio Efisiensi Terhadap Kemungkinan Kondisi Financial Distress

Pengujian variabel rasio efisiensi keuangan daerah pada Tabel 4.9 memiliki koefisien sebesar -50,117 dengan nilai signifikansi 0,019 yang berarti H_a diterima. Variabel efisiensi keuangan pemerintah daerah yang dihitung dengan LCO menunjukkan nilai koefisien sebesar -50,117 yang berarti satu persen kenaikan rasio efisiensi keuangan daerah akan menurunkan kondisi *financial distress* dengan $\exp = 0,00$.

Pemerintah daerah boleh saja melakukan investasi sepanjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)-nya diprediksi mengalami surplus. Pemda lebih dulu harus memenuhi kewajibannya untuk melayani masyarakat dan membangun daerah melalui APBD. Setelah kewajiban itu dipenuhi, baru pemda bisa merencanakan untuk berinvestasi. Sebaliknya, apabila APBD dinyatakan defisit, maka pemda harus membatalkan rencana investasi apapun. Investasi

yang dilakukan pemda sebenarnya tidak bertujuan untuk mengambil keuntungan secara bisnis, namun guna penyediaan pelayanan bagi masyarakat.

Pengaruh Rasio Efisiensi Terhadap Kemungkinan Kondisi Financial Distress

Pengujian variabel rasio hutang keuangan daerah pada Tabel 4.9 memiliki koefisien sebesar 228,758 dengan nilai signifikansi 0,016 yang berarti H_a diterima. Variabel hutang keuangan pemerintah daerah yang dihitung dengan DTR menunjukkan nilai koefisien sebesar 228,758 yang berarti satu persen kenaikan rasio efisiensi keuangan daerah akan menurunkan kondisi *financial distress* dengan $\exp = 2,23099$.

Dengan adanya pinjaman daerah (utang), pemerintah dapat melakukan kegiatan perekonomian daerah jika pendapatan daerah tidak mencukupi untuk kegiatan perekonomian daerah, dan pinjaman daerah (utang) merupakan jalan keluar untuk mengatasi kesulitan keuangan jika pendapatan daerah tidak mencukupi untuk kegiatan perekonomian. Tetapi jika keputusan pengambilan pinjaman daerah tersebut tidak disesuaikan dengan kemampuan pengembaliannya, hal itu bisa mengakibatkan jebakan utang. Dimana jumlah utang yang ditanggung akan semakin bertambah dan menyebabkan kesulitan keuangan (*financial dsitress*) pada PEMDA tersebut.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Analisis Rasio Keuangan Untuk Memprediksi Kemungkinan *Financial Distress*, maka dapat disimpulkan bahwa Variabel rasio kinerja keuangan, rasio posisi keuangan, rasio efisiensi keuangan, dan rasio hutang keuangan berpengaruh secara simultan terhadap prediksi kondisi *financial distress*. Variabel rasio kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap prediksi kondisi *financial distress*. Variabel rasio posisi keuangan berpengaruh negatif terhadap prediksi kondisi *financial distress*. Variabel rasio efisiensi keuangan berpengaruh negatif terhadap prediksi kondisi *financial distress*. Variabel rasio hutang keuangan berpengaruh positif terhadap prediksi kondisi *financial distress*.

Saran untuk penelitian selanjutnya lebih baik untuk menambahkan variabel lain, selain rasio posisi keuangan, rasio efisiensi keuangan, dan rasio hutang keuangan, sebagai faktor yang mempengaruhi prediksi kondisi *financial distress*. Lebih memperpanjang waktu penelitian (lebih dari 1 tahun) dalam menguji faktor yang mempengaruhi prediksi kondisi *financial distress*, karena jang-

ka waktu 1 tahun belum bisa sepenuhnya dapat memprediksi kondisi financial distress.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 19*. Edisi 4. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3, Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, Abdul dan Damayanti. 2008. *Manajemen Keuangan Daerah: Seri Bunga Rampai*. BPFE. Yogyakarta.
- Husna, Lutfia Hidayatul. 2011. "Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2005-2009". Skripsi. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim.
- Luciana Spica Almilila, Kristijadi. 2003. "Analisis Rasio Keuangan untuk Memprediksi Kondisi Financial Distress Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ". *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Vol. 7 No. 2.
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyer-taan Modal Investasi
- Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pen-gelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Pin-jaman Daerah.
- , Nomor: 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Republika.2011. Kemendagri Akui Ada Sejumlah Kabupaten-Kota Yang Berpotensi Bangkrut.4 Juni.
- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/07/04/Insf96-kemendagri-akui-ada-sejumlah-KabupatenKota-yang-berpoten-si-bangkrut> (27 Januari 2012)
- Solopos. 2011. alternatif penyehatan apbd. 27 Juli.
- <http://www.solopos.com/2011/kolom/alternatif-pe-nyehatan-apbd-108758> (27 Januari 2012)
- Sutaryo. 2010. "Nilai Relevan Informasi Laporan Keuangan Terkait Financial Distress Pemer-intah Daerah". *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XIII*.Purwokerto.13-14 Oktober.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerin-tahan daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perim-bangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- www.djpk.depkeu.go.id (25 Mei 2012)